



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NUR WAHID
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 110564

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.558.300.000

1. Tanah Seluas 294 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 205.800.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/142 m2 di KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/52 m2 di KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 502.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 136.500.000

1. MOTOR, HONDA BLADE SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 FI ISS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY PRESTIGE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 10.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 69.597.672

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.774.897.672

III. HUTANG

Rp. 210.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.564.897.672

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.